



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIT KERJA : UNIVERSITAS BENGKULU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAHRIAL
2. Jabatan : WAKIL REKTOR BIDANG KEMAHASISWAAN
3. NHK : 409554

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 2.712.735.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/36 m2 di KOTA BENGKULU ,
HASIL SENDIRI Rp. 14.160.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1323 m2/80 m2 di KOTA BENGKULU
, WARISAN Rp. 145.944.000
3. Tanah Seluas 104 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
255.000.000
4. Tanah Seluas 393 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
305.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 288 m2/75 m2 di KOTA BENGKULU ,
WARISAN Rp. 74.039.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 216 m2/148 m2 di KOTA BENGKULU
, HASIL SENDIRI Rp. 298.592.000
7. Tanah Seluas 114 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
355.000.000
8. Tanah Seluas 106 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
355.000.000
9. Tanah Seluas 107 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
355.000.000
10. Tanah Seluas 820 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
155.000.000
11. Tanah Seluas 974 m2 di KOTA BENGKULU , HASIL SENDIRI Rp.
400.000.000



B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	440.000.000
1. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2012, HASIL SENDIRI	Rp.	
5.000.000		
2. MOBIL, SUZUKI MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI	Rp.	
135.000.000		
3. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2004, HASIL SENDIRI	Rp.	
300.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	53.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	398.177.950
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.603.912.950
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.603.912.950

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.